

Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Koperasi Desa Tukamasea di Kabupaten Maros melalui Pelatihan Partisipatif

Haeruddin¹, Ibrahim², Asriati³, Aigistina⁴, Sirnan⁵, A. Emma Sukmawaty⁶, Erni Salijah⁷

¹Politeknik LP3I Makassar, ²STIE YPUP Makassar, ³Universitas Muhammadiyah Makassar; ^{4,5,6,7} Universitas Pepabri Makassar

haeruddindml@gmail.com

Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat kelembagaan koperasi desa agar dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Program dilaksanakan pada 30 Juni 2026 di Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, melalui kolaborasi Aliansi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, pemerintah desa, dan dosen lintas perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, kolaboratif, dan pendampingan. Rangkaian kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan, penyuluhan, pelatihan, demonstrasi pencatatan keuangan, diskusi kasus, konsultasi, serta evaluasi deskriptif melalui observasi partisipasi, tanya jawab, umpan balik, dan penelaahan capaian kegiatan. Materi dikelompokkan ke dalam penguatan manajemen koperasi, akuntansi dan perpajakan, serta pengembangan SDM dan strategi usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh agenda dan tiga kelompok materi terlaksana, partisipasi peserta berkembang dari kategori sedang menjadi sangat aktif, dan pemahaman mengenai fungsi manajemen, pencatatan keuangan, kewajiban perpajakan, tata kelola, serta digitalisasi koperasi meningkat secara kualitatif. Peserta juga menyusun komitmen tindak lanjut untuk memperbaiki administrasi, transparansi, pembagian tugas, dan kemitraan usaha. Keberlanjutan dampak memerlukan pendampingan periodik, digitalisasi sederhana, dan evaluasi berbasis instrumen pre-test dan post-test pada program berikutnya.

Kata kunci: akuntabilitas; kapasitas SDM; koperasi desa; pelatihan partisipatif; tata Kelola

Abstract: This community service initiative aims to enhance human resource capacity and strengthen village cooperative institutions, ensuring they are managed professionally, transparently, accountably, and sustainably. The program was conducted on June 30, 2026, in Tukamasea Village, Bantimurung District, Maros Regency, through a collaboration involving the Alliance of Indonesian Private Higher Education Institutions, the village government, and faculty members from various universities. The approach employed was educational, participatory, and collaborative, incorporating a mentoring component. The activities included needs assessment, outreach, training, financial recording demonstrations, case discussions, and consultations, alongside a descriptive evaluation based on participant observation, Q&A sessions, feedback, and a review of outcomes. The material covered cooperative management strengthening, accounting and taxation, as well as human resource development and business strategy. Results indicate that the entire agenda and all three material modules were successfully implemented; participant engagement evolved from moderate to highly active; and there was a qualitative improvement in understanding management functions, financial recording, tax obligations, governance, and cooperative digitalization. Participants also formulated follow-up commitments to improve administration, transparency, task allocation, and business partnerships. Sustaining the impact requires periodic mentoring, the implementation of simple digitalization, and evaluations utilizing pre-test and post-test instruments in future programs.

Keywords: *accountability; human resource capacity; village cooperative; participatory training; governance*

PENDAHULUAN

Koperasi desa memiliki posisi strategis dalam mengonsolidasikan kegiatan ekonomi masyarakat, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta memperkuat posisi tawar produsen skala kecil. Dalam kerangka pembangunan berbasis komunitas, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan organisasi anggota yang keberhasilannya ditentukan oleh partisipasi, kepercayaan, tata kelola demokratis, dan kemampuan pengurus menerjemahkan kepentingan anggota ke dalam keputusan usaha. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Rekomendasi ILO Nomor 193 yang menempatkan koperasi sebagai instrumen penciptaan pekerjaan layak, inklusi, dan pembangunan lokal. Potensi tersebut belum selalu diikuti kapasitas kelembagaan yang memadai. Koperasi di wilayah pedesaan kerap menghadapi keterbatasan perencanaan usaha, pembagian fungsi organisasi, administrasi anggota, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pemanfaatan teknologi. Keterbatasan itu saling berkaitan: pencatatan yang lemah mengurangi kualitas informasi pengambilan keputusan, sedangkan rendahnya transparansi dapat mengikis kepercayaan anggota. Studi penguatan SDM koperasi menunjukkan bahwa pelatihan teknis, pemahaman regulasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi merupakan kebutuhan yang menentukan kesinambungan unit usaha (Qadarin et al., 2024).

Literasi akuntansi menjadi komponen mendasar karena laporan keuangan berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan dasar evaluasi kinerja. Pelatihan yang memadukan penjelasan konsep dengan praktik pencatatan terbukti meningkatkan pemahaman peserta dan kesadaran terhadap risiko kesalahan pencatatan serta pentingnya transparansi (Rahayu et al., 2025). Namun, transfer pengetahuan satu arah sering tidak cukup. Pembelajaran yang partisipatif dan berbasis persoalan nyata lebih memungkinkan peserta menghubungkan materi dengan praktik organisasi, menyampaikan kendala, dan menyepakati solusi yang dapat dijalankan. Transformasi digital juga membuka peluang bagi koperasi untuk mempercepat administrasi, memperbaiki akurasi data, menyediakan laporan secara lebih cepat, dan memperluas pemasaran. Pada saat yang sama, manfaat digitalisasi bergantung pada kesiapan SDM, infrastruktur, kesederhanaan sistem, dan dukungan pemeliharaan. Pajri dan Sa'ida (2026) menunjukkan bahwa sistem koperasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi keterbatasan literasi digital dan infrastruktur tetap menjadi hambatan penting. Karena itu, penguatan kapasitas perlu dilakukan secara bertahap, menempatkan teknologi sebagai alat tata kelola, bukan tujuan yang berdiri sendiri.

Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, memiliki basis kegiatan pertanian dan perikanan yang membutuhkan kelembagaan ekonomi kolektif yang kuat. Identifikasi awal tim menunjukkan bahwa pengurus dan masyarakat masih memerlukan penguatan pada fungsi manajemen, administrasi dan akuntansi, perpajakan, tata kelola, kepemimpinan, pengembangan usaha, dan pemasaran digital. Permasalahan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan PKM Nasional bertema “Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Koperasi Desa yang Profesional dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan koperasi, melatih pencatatan dan pelaporan keuangan sederhana, memperkenalkan kewajiban perpajakan, memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta membangun komitmen tindak lanjut. Kebaruan praktis program terletak pada integrasi tiga rumpun materi manajemen, akuntansi-perpajakan, dan pengembangan SDM-usaha melalui kolaborasi dosen lintas disiplin dan metode partisipatif. Artikel ini mendeskripsikan proses pelaksanaan,

perubahan pemahaman yang teramati, capaian kegiatan, keterbatasan evaluasi, dan agenda pendampingan yang diperlukan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juni 2026 di Kantor Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Desa Tukamasea, sedangkan penyelenggara merupakan tim PKM Nasional Kelompok VII yang tergabung dalam Aliansi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI). Sasaran program meliputi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi; kelompok tani dan nelayan; perangkat desa; tokoh masyarakat; pelaku UMKM; serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan koperasi desa. Jumlah peserta numerik tidak dicantumkan dalam laporan sumber sehingga artikel ini tidak melakukan estimasi. Desain program menggabungkan pendekatan edukatif, partisipatif, kolaboratif, aplikatif, dan pendampingan. Pendekatan edukatif digunakan untuk menjelaskan konsep dan regulasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan partisipatif menempatkan peserta sebagai sumber pengalaman melalui diskusi, identifikasi masalah, dan penyusunan solusi. Kolaborasi lintas disiplin memungkinkan materi manajemen, akuntansi, perpajakan, SDM, dan teknologi disajikan secara terpadu. Pendampingan digunakan untuk membantu peserta menerapkan konsep ke dalam dokumen dan masalah organisasi yang mereka hadapi.

Pelaksanaan dibagi menjadi empat tahap. Pertama, tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, pengurus koperasi, dan panitia; identifikasi kebutuhan; pembagian tugas narasumber; penyusunan jadwal; serta penyiapan modul dan sarana. Kedua, tahap pelaksanaan meliputi registrasi, pembukaan, penyampaian tiga kelompok materi, demonstrasi pencatatan, diskusi, konsultasi, penyusunan komitmen, dan penutupan. Ketiga, evaluasi dilakukan melalui observasi keterlibatan, pertanyaan peserta, diskusi akhir, umpan balik, serta perbandingan kategori pemahaman sebelum dan setelah kegiatan yang tersedia dalam laporan. Keempat, tindak lanjut diarahkan pada pendampingan laporan keuangan, konsultasi tata kelola, digitalisasi administrasi, dan pengembangan kemitraan.

Data artikel bersumber dari laporan kegiatan, daftar hadir dan surat keterangan yang dirujuk dalam laporan, catatan observasi, materi pelatihan, tabel evaluasi, umpan balik peserta, serta dokumentasi foto. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan temuan ke dalam perubahan pengetahuan, keterampilan, kelembagaan, dan jejaring sosial. Persentase capaian digunakan hanya untuk indikator proses yang dinyatakan eksplisit dalam laporan. Karena kegiatan belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test bernilai numerik, artikel tidak menafsirkan perubahan kategori sebagai besaran efek statistik.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan program PKM

Tahap	Aktivitas utama	Luaran yang diharapkan
Persiapan	Koordinasi, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan pembagian narasumber	Materi sesuai masalah mitra dan kesiapan pelaksanaan
Pelaksanaan	Penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, diskusi kasus dan konsultasi	Pengetahuan dan keterampilan dasar pengelolaan koperasi
Evaluasi	Observasi partisipasi, tanya jawab, umpan balik dan telaah capaian	Gambaran perubahan pemahaman dan kebutuhan lanjutan
Tindak lanjut	Pendampingan akuntansi, tata kelola, digitalisasi dan jejaring	Penerapan hasil pelatihan secara berkelanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program dan Partisipasi Peserta

Kegiatan berlangsung selama satu hari, diawali registrasi pukul 08.00 WITA, pembukaan oleh perwakilan pemerintah desa, pengenalan narasumber, penyampaian materi, diskusi dan konsultasi, penyusunan komitmen, penyerahan cendera mata, serta foto bersama. Dukungan pemerintah desa memudahkan koordinasi dan administrasi kegiatan. Kehadiran unsur koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, perangkat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat memperluas sudut pandang diskusi dari persoalan internal organisasi menuju hubungan koperasi dengan ekosistem ekonomi desa.

Partisipasi peserta dalam laporan awalnya dikategorikan sedang dan setelah kegiatan menjadi sangat aktif. Perubahan terlihat dari intensitas pertanyaan, kesediaan menyampaikan persoalan yang dihadapi, dan keterlibatan dalam konsultasi. Pertanyaan peserta terpusat pada cara meningkatkan jumlah anggota, menyusun laporan keuangan sederhana, menentukan kewajiban pajak, memperoleh modal, dan memasarkan produk. Pola pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak hanya bersifat konseptual, tetapi berhubungan langsung dengan kelangsungan operasi koperasi.



Gambar 1. Kegiatan PKM bersama Pemerintah Desa Tukamasea

Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Koperasi

Materi manajemen menekankan integrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Peserta diarahkan untuk menerjemahkan visi dan tujuan koperasi ke dalam program kerja, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan evaluasi berkala. Salah satu perubahan pemahaman yang dicatat adalah pergeseran cara pandang dari koperasi sebagai organisasi simpan pinjam semata menuju koperasi sebagai organisasi anggota sekaligus badan usaha yang membutuhkan manajemen profesional.

Perubahan perspektif tersebut penting karena tata kelola yang baik tidak cukup dibangun melalui struktur formal. Transparansi informasi, akuntabilitas pengurus, kejelasan peran, partisipasi anggota, dan konsistensi evaluasi perlu hadir dalam praktik sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan temuan Qadarin et al. (2024) bahwa peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman regulasi memperkuat kualitas unit usaha koperasi. Dalam konteks Tukamasea, diskusi kasus membantu peserta menghubungkan fungsi manajemen dengan persoalan keanggotaan, pelayanan, modal, dan kemitraan.

Solusi yang disepakati terhadap rendahnya pertumbuhan anggota adalah memperbaiki pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan anggota. Rekomendasi tersebut menegaskan hubungan antara tata kelola dan kepercayaan. Koperasi yang mampu menjelaskan kinerja, mengelola keluhan, serta melibatkan anggota dalam keputusan memiliki dasar sosial yang lebih kuat untuk berkembang.

Materi manajemen menekankan integrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Peserta diarahkan untuk menerjemahkan visi dan tujuan koperasi ke dalam program kerja, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan evaluasi berkala. Salah satu perubahan pemahaman yang dicatat adalah pergeseran cara pandang dari koperasi sebagai organisasi simpan pinjam semata menuju koperasi sebagai organisasi anggota sekaligus badan usaha yang membutuhkan manajemen profesional.

Perubahan perspektif tersebut penting karena tata kelola yang baik tidak cukup dibangun melalui struktur formal. Transparansi informasi, akuntabilitas pengurus, kejelasan peran, partisipasi anggota, dan konsistensi evaluasi perlu hadir dalam praktik sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan temuan Qadarin et al. (2024) bahwa peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman regulasi memperkuat kualitas unit usaha koperasi. Dalam konteks Tukamasea, diskusi kasus membantu peserta menghubungkan fungsi manajemen dengan persoalan keanggotaan, pelayanan, modal, dan kemitraan.

Solusi yang disepakati terhadap rendahnya pertumbuhan anggota adalah memperbaiki pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan anggota. Rekomendasi tersebut menegaskan hubungan antara tata kelola dan kepercayaan. Koperasi yang mampu menjelaskan kinerja, mengelola keluhan, serta melibatkan anggota dalam keputusan memiliki dasar sosial yang lebih kuat untuk berkembang.

Penguatan Akuntansi, Keuangan, dan Kepatuhan Perpajakan

Materi akuntansi membahas siklus pencatatan dari bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, hingga laporan hasil usaha, neraca, arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Demonstrasi pencatatan sederhana menjadi bagian yang paling diminati karena sebagian pengurus masih menggunakan catatan kas terbatas. Peserta memperoleh gambaran bahwa kualitas laporan tidak ditentukan oleh kompleksitas aplikasi, melainkan oleh konsistensi bukti, klasifikasi transaksi, rekonsiliasi, dan ketepatan waktu pelaporan.

Secara kualitatif, pemahaman akuntansi berubah dari kategori rendah menjadi meningkat. Temuan ini sejalan dengan Rahayu et al. (2025), yang melaporkan bahwa sosialisasi dan praktik SAK-EP berbasis partisipatif meningkatkan literasi akuntansi serta kesadaran atas transparansi. Pada kegiatan Tukamasea, solusi praktis yang diberikan adalah memulai dari buku kas dan jurnal transaksi, memindahkan catatan ke buku besar, kemudian menyusun laporan secara periodik. Tahapan sederhana tersebut lebih realistis bagi koperasi yang baru menata administrasi.

Materi perpajakan mencakup PPh Pasal 21, PPh Badan, PPh Pasal 23, PPN, administrasi, dan kepatuhan. Diskusi memperlihatkan bahwa peserta belum memahami kewajiban koperasi secara utuh. Narasumber menekankan bahwa kewajiban pajak ditentukan oleh status dan jenis transaksi, sehingga pengurus perlu mengidentifikasi aktivitas sebelum menghitung dan melaporkan pajak. Penguatan pada aspek ini berkontribusi pada akuntabilitas eksternal sekaligus mengurangi risiko ketidakpatuhan.



Gambar 2. Penyampaian materi dan dialog dengan peserta

Penguatan SDM, Strategi Usaha, dan Digitalisasi

Kelompok materi ketiga membahas kepemimpinan, penguatan kompetensi, pemasaran digital, kemitraan, pengembangan modal, dan teknologi informasi. Peserta diarahkan untuk memandang pengembangan SDM sebagai proses berkelanjutan yang mencakup regenerasi pengurus, pembagian pengetahuan, pembiasaan administrasi, dan evaluasi kinerja. Koperasi juga didorong membangun hubungan dengan BUMDes, UMKM, lembaga keuangan, pemerintah, dan pasar digital.

Digitalisasi dibahas secara bertahap, dimulai dari tertib data anggota, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, dan komunikasi pemasaran. Pendekatan bertahap relevan karena laporan mencatat keterbatasan sarana praktik digital serta variasi kemampuan peserta. Pajri dan Sa'ida (2026) menegaskan potensi digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akses informasi, tetapi manfaat tersebut membutuhkan literasi digital, infrastruktur, dan pemeliharaan sistem. Oleh karena itu, pilihan teknologi bagi koperasi Tukamasea harus sederhana, terjangkau, mudah dipelajari, dan sesuai volume transaksi.

Dari sisi jejaring, kegiatan mempertemukan pemerintah desa, masyarakat, koperasi, dan perguruan tinggi. Relasi ini merupakan modal penting untuk pendampingan jangka panjang. Sistem akuntansi partisipatif yang mempertimbangkan nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong dapat memperkuat rasa memiliki dan legitimasi organisasi (Djaddang et al., 2025). Dengan demikian, modernisasi tata kelola tidak perlu menghilangkan karakter kolektif koperasi, melainkan menerjemahkannya ke dalam prosedur yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian, Dampak Awal, dan Keterbatasan Evaluasi

Seluruh indikator proses yang dicantumkan dalam laporan dinyatakan tercapai. Satu kegiatan terlaksana, tiga kelompok materi tersampaikan, kehadiran sesuai daftar undangan, diskusi interaktif dan pendampingan terlaksana, surat keterangan diterbitkan pemerintah desa, serta dokumentasi tersedia. Capaian 100% tersebut harus dibaca sebagai keterlaksanaan proses, bukan ukuran dampak pengetahuan jangka panjang.

Tabel 2. Perubahan kategori pemahaman dan partisipasi peserta

Indikator	Kondisi awal	Setelah kegiatan	Interpretasi
Pemahaman fungsi manajemen	Rendah	Baik	Peserta memahami fungsi manajemen secara terpadu

Indikator	Kondisi awal	Setelah kegiatan	Interpretasi
Pemahaman akuntansi koperasi	Rendah	Meningkat	Peserta mengenali alur pencatatan dan pelaporan sederhana
Pemahaman perpajakan	Rendah	Meningkat	Peserta memahami bahwa kewajiban mengikuti status dan transaksi
Partisipasi peserta	Sedang	Sangat aktif	Diskusi dan konsultasi berkembang selama kegiatan
Komitmen pengurus	Sedang	Tinggi	Muncul rencana perbaikan administrasi dan tata kelola

Dampak awal program mencakup empat dimensi. Pertama, dimensi pengetahuan berupa meningkatnya pemahaman tentang manajemen, akuntansi, pajak, kepemimpinan, dan tata kelola. Kedua, dimensi keterampilan berupa kemampuan awal mencatat transaksi, menyusun program kerja, dan menata administrasi. Ketiga, dimensi kelembagaan berupa kesadaran terhadap pembagian tugas, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi. Keempat, dimensi sosial berupa terbentuknya komunikasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, koperasi, dan masyarakat. Meskipun demikian, evaluasi memiliki keterbatasan. Laporan tidak menyertakan jumlah peserta secara numerik, instrumen pengukuran, skor individual, atau uji pre-test dan post-test. Kategori “rendah”, “meningkat”, “baik”, dan “tinggi” terutama bersumber dari observasi serta umpan balik. Karena itu, hasil belum dapat digunakan untuk menghitung besaran perubahan atau menguji signifikansi. Program berikutnya perlu menggunakan instrumen yang sama sebelum dan sesudah kegiatan, rubrik keterampilan untuk praktik laporan keuangan, indikator implementasi setelah satu hingga tiga bulan, dan dokumentasi jumlah peserta yang konsisten.

Faktor pendukung utama adalah dukungan pemerintah desa, kolaborasi dosen lintas perguruan tinggi, kesesuaian materi, antusiasme peserta, dan koordinasi panitia. Hambatannya meliputi waktu yang singkat dibandingkan keluasan materi, variasi kemampuan awal, dan keterbatasan sarana digital. Temuan ini menunjukkan bahwa model satu hari efektif sebagai pemantik, tetapi belum memadai untuk membentuk kebiasaan administrasi. Pendampingan berseri dan klinik tematik diperlukan agar pengetahuan berkembang menjadi praktik.



Gambar 3. Pendampingan dan diskusi kelompok peserta

Model Tindak Lanjut Berkelanjutan

Berdasarkan hasil kegiatan, tindak lanjut disusun dalam tiga horizon. Horizon pertama (0-3 bulan) memprioritaskan tertib buku kas, bukti transaksi, daftar anggota, pembagian tugas, dan kalender rapat. Horizon kedua (3-6 bulan) memfokuskan penyusunan laporan berkala, pemetaan kewajiban perpajakan, rencana bisnis, dan pemasaran digital sederhana. Horizon ketiga (6-12 bulan) diarahkan pada sistem informasi yang proporsional, kemitraan pembiayaan dan pasar, audit internal sederhana, serta evaluasi manfaat ekonomi anggota. Setiap horizon perlu memiliki penanggung jawab, indikator, dan forum tinjauan bersama pemerintah desa serta pendamping perguruan tinggi.

Tabel 3. Agenda tindak lanjut penguatan koperasi Desa Tukamasea

Horizon	Prioritas	Indikator minimum
0-3 bulan	Administrasi dasar dan pembagian peran	Buku kas aktif, bukti transaksi tersimpan, daftar anggota dan tugas pengurus tersedia
3-6 bulan	Pelaporan, pajak, rencana usaha dan pemasaran	Laporan berkala, pemetaan pajak, rencana bisnis dan kanal pemasaran sederhana
6-12 bulan	Digitalisasi proporsional dan kemitraan	Sistem data berjalan, evaluasi internal, kemitraan pasar/pembiayaan dan laporan manfaat anggota

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM Nasional di Desa Tukamasea berhasil melaksanakan tiga rumpun penguatan—manajemen koperasi, akuntansi dan perpajakan, serta SDM dan strategi pengembangan usaha—melalui metode edukatif, partisipatif, kolaboratif, dan pendampingan. Hasil deskriptif menunjukkan peningkatan kategori pemahaman pada fungsi manajemen, akuntansi, perpajakan, tata kelola, dan digitalisasi; partisipasi berkembang menjadi sangat aktif; serta muncul komitmen memperbaiki administrasi, transparansi, pembagian tugas, dan kemitraan. Kegiatan juga memperkuat jejaring antara koperasi, pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Dampak yang teridentifikasi masih merupakan dampak awal berbasis observasi dan umpan balik, sehingga keberlanjutan program perlu diarahkan pada pendampingan periodik. Pengurus disarankan memulai dari pencatatan sederhana yang konsisten, pembagian fungsi, rapat evaluasi, dan keterbukaan informasi anggota. Pemerintah desa perlu memfasilitasi sarana, kemitraan, dan integrasi koperasi dengan BUMDes, kelompok tani, nelayan, serta UMKM. Perguruan tinggi dan ADPERTISI perlu menyelenggarakan klinik lanjutan mengenai laporan keuangan berbasis aplikasi, perpajakan, rencana bisnis, pemasaran digital, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Evaluasi berikutnya perlu menggunakan pre-test, post-test, rubrik praktik, jumlah peserta yang terdokumentasi, dan pemantauan implementasi agar dampak dapat diukur secara lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim menyampaikan terima kasih kepada ADPERTISI, Pemerintah Desa Tukamasea, seluruh perguruan tinggi yang terlibat, pengurus dan anggota koperasi, kelompok tani dan nelayan, perangkat desa, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, peserta, serta panitia yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR RUJUKAN

Djaddang, S., Harovinsyah, Hasnawati, Roziq, M., & Lisandra, S. (2025). Integration of local wisdom in participatory accounting systems for community empowerment in supporting sustainable village-owned enterprise development. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 8(10). <https://doi.org/10.47191/jefms/v8-i10-03>

- International Labour Organization. (2002). Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193). ILO.
- Pajri, A. E., & Sa'ida, I. A. (2026). Digitalisasi untuk penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.64479/jtpm.v2i1.54>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Qadarin, M., Mahmudi, Suliyeh, Aprilia, S., & Sahrul. (2024). Penguatan sumber daya insani menuju unit usaha berkualitas di Koperasi Rakhis PP. Nazhatut Thullab Sampang. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v3i1.3828>
- Rahayu, D. P., Sabar, Rohayati, I., Iskandar, F. N., & Heriansyah, D. (2025). Peningkatan kapasitas akuntansi koperasi melalui sosialisasi SAK-EP di Desa Sayati. *Room of Civil Society Development*. <https://doi.org/10.59110/rcsd.708>
- Tim PKM Nasional Kelompok VII. (2026). Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi desa yang profesional dan berkelanjutan. ADPERTISI.
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206-224. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046>